

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi tantangan, peluang, sekaligus kunci keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik. Bidang ini sangat penting untuk tidak terlewatkan. Demoralisasi yang dialami peserta didik yang beragama Hindu karena terabaikannya bidang ini justru berpotensi besar mengakibatkan buruknya masa depan bangsa ini pada umumnya.

Pendidikan agama Hindu, baik di jalur formal maupun non formal selalu menjadi perdebatan panjang antar pemerhati maupun instansi pada setiap dialog diberbagai kesempatan. Saat ini umat Hindu memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap pendidikan Agama Hindu. Tidak adanya data atau informasi yang valid atau hasil penelitian yang sudah diverifikasi terkait bagaimana pola implementasi pendidikan Agama Hindu di Kota Bekasi ikut menguatkan hal tersebut.

Pendidikan Agama Hindu di Kota Bekasi sudah berjalan meski banyak hambatan (Ida Bagus Subawa, komunikasi pribadi, 17 September 2015). Penelitian awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa beberapa peserta didik sudah mendapatkan pendidikan Agama Hindu di sekolahnya dan mendapatkan nilai Agama Hindu yang kemudian dicantumkan dalam raportnya tetapi ada yang tidak mendapatkannya.

Pendidikan agama Hindu belum berjalan dengan baik karena masih sering mengalami kendala dalam prosesnya (Nyoman Sukadisa, komunikasi pribadi, 17 September 2015). Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa masih ada peserta didik yang tidak mendapatkan pendidikan Agama Hindu di sekolahnya. Sementara, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Departemen Agama, 2006 hal. 12).

Pendidikan Agama Hindu di Kota Bekasi memang belum bisa sepenuhnya diimplementasikan di semua sekolah (Eko Prasetyo, komunikasi pribadi, 5 Januari 2017). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan belum mengatur secara teknis pelaksanaan pendidikan Agama Hindu. Sementara itu Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, memberikan syarat yang banyak agar implementasi pendidikan Agama Hindu dapat berjalan dengan baik.

Di Kota Bekasi, terdapat banyak peserta didik yang beragama Hindu untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas tetapi tidak terdapat sekolah bernuansa Hindu atau mempunyai ciri khas keagamaan Hindu. Ada sekitar 800 peserta didik dengan hanya 1 (satu) guru Agama Hindu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lembaga pendidikan Agama Hindu juga hanya ada 2 (dua) dengan kapasitas masing-masing 200 orang. Selain itu data mengenai pola implementasi pendidikan Agama Hindu di Kota Bekasi belum ada, termasuk untuk tahun pelajaran 2016/2017. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pola implementasi pendidikan Agama Hindu juga belum terdokumentasikan dengan baik dan hanya menjadi sekedar wacana di masyarakat. Implementasi PMA No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah juga belum diketahui khususnya untuk pendidikan Agama Hindu.

Dalam konteks otonomi sekolah, setiap sekolah umum keagamaan berhak hanya menawarkan pelajaran agama sesuai dengan ciri khasnya. Misalnya sekolah katolik berhak hanya menawarkan pelajaran agama katolik. Sekolah Kristen hanya menawarkan agama Kristen, sekolah Islam hanya menawarkan pelajaran agama Islam. Akan tetapi sekolah tidak berhak mewajibkan peserta didiknya dari agama lain mengikuti pelajaran agama sesuai ciri khas keagamaan sekolah yang bersangkutan. Fenomena yang terjadi di Kota

Bekasi, beberapa peserta didik yang beragama Hindu mengaku mengikuti pelajaran agama lain dan bahkan memperoleh nilai yang kemudian dicantumkan di dalam raport sebagai nilai mata pelajaran agama. Disisi lain terdapat lembaga agama yang siap melaksanakan pendidikan bagi siswa yang tidak mendapatkan pendidikan agama Hindu di sekolahnya.

Dalam konteks pluralisme, apabila sekolah swasta dengan ciri khas keagamaan tertentu yang memutuskan membuka pintu bagi pluralitas agama, hak anak dan pendirian orangtua mereka masing-masing perlu dihormati. Maka tidak menjadi masalah, kalau sekolah dengan basis keagamaan tertentu menerima pelajaran dan guru agama lain. Sekolah Kristen, Sekolah Katolik, atau sekolah-sekolah di bawah yayasan Muhamadiyah adalah beberapa contoh sekolah swasta dengan ciri khas keagamaan yang beberapa diantaranya terbuka bagi siswa dari agama lain. Dengan semangat pluralisme, sekolah bisa melaksanakan pendidikan agama lain dan menyediakan guru agama yang sesuai dengan agama siswanya. Misalkan sekolah Kristen yang menerima siswa beragama Hindu, maka sekolah bisa menyediakan guru agama Hindu dan melaksanakan proses belajar mata pelajaran agama Hindu. Dengan begitu maka hak anak menjadi terpenuhi dan pendirian orang tua yang anaknya seagama dengan orangtuanya menjadi dihormati. Tetapi di Kota Bekasi, jumlah guru Agama Hindu yang aktif mengajar di sekolah-sekolah swasta dengan ciri khas keagamaan tertentu sangat sedikit jumlahnya.

Peran aktif orangtua terhadap pendidikan Agama Hindu anaknya sangat diperlukan. Masih banyak ditemukan orangtua menyerahkan seluruh pendidikan anaknya kepada sekolah. Apakah di sekolah anaknya mendapatkan pelajaran agama atau tidak, kurang mendapat perhatian orangtua.

Pendidikan Agama Hindu secara sistematis melalui kurikulum pendidikan formal dapat dibilang sangat lemah. Kurangnya guru Agama Hindu, sedikitnya jumlah siswa, dan minimnya jumlah jam pelajaran untuk

pendidikan Agama Hindu menjadi kendala-kendala yang akrab dihadapi umat Hindu di Kota Bekasi.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa masalah yang terjadi terkait pola implementasi pendidikan Agama Hindu pada tingkat SMA di Kota Bekasi, yaitu:

- a. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pendidikan Agama Hindu.
- b. Rendahnya motivasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan Agama Hindu.
- c. Kurangnya jumlah guru yang mengajar pendidikan Agama Hindu.
- d. Kurangnya peran aktif orangtua dalam pendidikan Agama Hindu bagi anaknya.
- e. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan Agama Hindu kurang mendapat perhatian.
- f. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang implementasi Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah di Kota Bekasi.

Pola implementasi pendidikan Agama Hindu di Kota Bekasi belum jelas seperti apa. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan agama Hindu juga belum diketahui secara pasti. Serta implementasi PMA No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah khususnya untuk pendidikan agama Hindu belum diketahui pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pola implementasi pendidikan agama Hindu pada tingkat SMA di Kota Bekasi (Studi Deskriptif Kualitatif).

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pola implementasi pendidikan Agama Hindu pada tingkat SMA di Kota Bekasi.

Sub fokus penelitian ini adalah

- a. Sub fokus pertama adalah bagaimana pola implementasi pendidikan Agama Hindu pada tingkat SMA di Kota Bekasi.
- b. Sub fokus kedua adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat pola implementasi pendidikan Agama Hindu pada tingkat SMA di Kota Bekasi.
- c. Sub fokus ketiga adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah di Kota Bekasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pola implementasi pendidikan Agama Hindu yang paling efektif.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pola implementasi pendidikan Agama Hindu pada tingkat SMA di Kota Bekasi.
- c. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah di Kota Bekasi.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada pola implementasi pendidikan Agama Hindu yang paling efektif pada tingkat SMA Negeri tahun pelajaran 2016/2017 di Kota Bekasi, faktor pendukung dan penghambatnya, serta implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah di Kota Bekasi khususnya pasal 3 dan 4.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berguna bagi masyarakat luas dalam menciptakan paradigma yang tepat terkait pola implementasi pendidikan Agama Hindu pada tingkat SMA di Kota Bekasi.
- b. Berguna bagi orang tua murid sebagai bahan pengambilan keputusan terkait pilihan sekolah bagi anak-anaknya.
- c. Berguna bagi sekolah-sekolah di wilayah pemerintahan Kota Bekasi sebagai bahan kajian dalam evaluasi implementasi pendidikan Agama Hindu.
- d. Berguna bagi sekolah-sekolah di Kota Bekasi sebagai bahan kajian dalam membuat perencanaan strategis implementasi pendidikan Agama Hindu.
- e. Berguna bagi orangtua dan peserta didik yang beragama Hindu untuk lebih peduli terhadap pendidikan agama.
- f. Berguna sebagai bahan kajian tindak lanjut bagi pemerhati, pelaksana, dan pembuat kebijakan terkait implementasi pendidikan Agama Hindu.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan selanjutnya adalah Bab II berisi Kajian Pustaka. Bab III adalah Metode Penelitian, Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, dan Bab V Kesimpulan, Implikasi, dan Saran. Bab I tidak perlu dituliskan lagi.